



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*Public relations* (PR) merupakan bidang profesi yang relatif baru berkembang. Profesi PR diakui sebagai salah satu fungsi manajemen yang turut menentukan keberhasilan organisasi, baik profit maupun non-profit. Sayangnya, belum semua organisasi memperhatikan pentingnya peran PR. Moore dalam Sari (2012:21) menyatakan bahwa beberapa perusahaan hanya menganggap aktivitas PR sebagai tugas tambahan, yang umumnya dipercayakan untuk dijalankan oleh bagian lain ataupun penasihat luar yang bertindak sebagai pembantu/*support*.

Jefkins, sebagaimana dikutip Sari (2012:1), mendefinisikan PR sebagai sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar antara suatu organisasi dengan semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. PR berupaya untuk memengaruhi sikap dan perbuatan publik sesuai dengan keinginan organisasi, dan sebaliknya. PR menggabungkan fungsi komunikasi dan manajemen sehingga organisasi mampu mencapai tujuannya. Oleh karena itu, setiap organisasi; profit maupun non-profit, besar atau kecil, swasta atau pemerintah, membutuhkan PR.

PR di lembaga pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan PR di instansi swasta. Perbedaan yang mendasar adalah tidak adanya unsur komersial (pencarian untung). PR di lembaga pemerintah menekankan pada pelayanan publik. Tugas PR di lembaga pemerintah adalah menginformasikan kepada publik mengenai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah (Sari, 2012:73). Dengan demikian, diharapkan publik dapat turut mendukung aktivitas tersebut.

Mengutip dari buku Millet, "*Management in Public Service the Quest for Effective Performance*", Sari (2012:74) menjelaskan beberapa tugas utama PR di lembaga pemerintahan sebagai berikut.

1. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (*learning about public desires and aspiration*);
2. Kegiatan memberikan nasihat atau saran untuk menanggapi apa sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya (*advising the public about what is should desire*);
3. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik dengan para aparat pemerintah (*ensuring satisfactory contact between public and government official*);
4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintahan yang bersangkutan (*informing and explaining about what an agency is doing*).

Perbedaan lain antara PR pemerintah dan swasta adalah publiknya. Setiap organisasi pasti menghadapi publik yang beragam. Semakin luas ruang lingkup suatu organisasi, semakin banyak dan beragam publik yang harus dilayaninya. PR di lembaga pemerintah, khususnya dalam lingkup nasional, harus menghadapi publik yang beragam: kementerian/lembaga terkait, pihak swasta, lembaga donor, kelompok kepentingan, maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Publik yang luas mengindikasikan banyaknya kepentingan yang harus diakomodasi oleh seorang PR.

PR pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis. PR berperan untuk mempromosikan (publikasi) kebijakan, memberikan informasi mengenai hasil kerja lembaga pemerintahan, dan memberi pengertian kepada masyarakat mengenai kebijakan dan peraturan yang dibuat. Pada beberapa kesempatan, PR pemerintah juga dapat memberikan masukan mengenai reaksi masyarakat terhadap suatu kebijakan dan memberikan saran bagi pihak pemerintah. Keberadaan PR di lembaga pemerintah juga menjawab tuntutan publik atas transparansi informasi.

Keberadaan PR di lembaga pemerintah merupakan perwujudan dari GCG (*Good Corporate Governance*). Istilah *corporate governance* menurut Becht

dalam Solihin (2009:115) berasal dari suatu analogi antara pemerintahan suatu negara atau kota dengan pemerintahan dalam suatu perusahaan. Pemerintahan negara melibatkan berbagai kelompok dengan berbagai kepentingan berbeda yang kemudian diselaraskan untuk mencapai suatu tujuan bersama. PR bertugas mengelola keselarasan kepentingan tersebut. Tanpa keselarasan, dapat terjadi konflik kepentingan yang berdampak buruk pada kinerja pemerintahan.

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk membuat regulasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan GCG. Sedangkan masyarakat sebagai penyedia sumber daya dan “pembeli produk” pemerintah, merupakan sumber legitimasi yang berpotensi untuk mendukung atau menghambat keberadaan suatu pemerintahan. Masyarakat juga merupakan pemangku kepentingan eksternal yang dipengaruhi oleh berbagai keputusan pemerintah sehingga kepentingan mereka harus diperhatikan oleh pemerintah (Solihin, 2009:117).

Pelaksanaan GCG menjadi penting, khususnya di negara demokrasi seperti Indonesia. Menurut Solihin (2009:123), penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Solihin (2009:125) menjelaskan beberapa prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Transparansi adalah kemampuan pemerintah menjaga objektivitas dengan menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses serta dipahami oleh pemangku kepentingan. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan wajar.

Responsibilitas merupakan kepatuhan terhadap aturan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap publik sehingga pemerintahan dapat terpelihara secara berkesinambungan. Independensi menunjukkan bahwa masing-masing bagian tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Kewajaran menunjukkan bahwa dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kewajaran dan kesetaraan.

Sejak tahun 2004, Indonesia melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Agar terpilih, setiap kandidat harus mengajukan visi dan misi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat Indonesia. Tahun 2009, pasangan SBY-Boediono menjadikan “Membangun Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” sebagai kerangka visi Indonesia 2014. Salah satu prioritasnya adalah penanggulangan kemiskinan (TNP2K, 2011:17).

Upaya pemerintah untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui pembentukan regulasi dan kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan publik menurut Utomo (2000:4) adalah keputusan (formal) pemerintah yang berisi program-program pembangunan sebagai realisasi dari fungsi atau tugas negara, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan publik merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Mengenai prioritas penanggulangan kemiskinan, Presiden SBY menetapkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. PerPres tersebut mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang bertugas menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.

Pembentukan dan implementasi *public policy* saja tidak cukup. Suatu kebijakan, khususnya yang menyangkut kepentingan banyak pihak, perlu dikomunikasikan dengan baik agar mendapat dukungan dari seluruh pihak yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Tanpa dukungan publik, tidak ada kebijakan dan program yang dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, TNP2K memiliki divisi komunikasi yang bertugas untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan guna memperoleh dukungan publik.

Divisi komunikasi TNP2K bertugas untuk mempromosikan peran dan fungsi TNP2K, meningkatkan kesadaran publik mengenai kemiskinan dan upaya penanggulangan kemiskinan, mendukung upaya komunikasi yang dilakukan oleh

organisasi (akuntabilitas), mengelola materi publikasi dan komunikasi TNP2K (transparansi), dan mengelola ekspektasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam upaya penanggulangan kemiskinan (responsibilitas). Divisi komunikasi menjadi upaya perwujudan GCG bagi TNP2K, dan secara umum menjadi perwujudan GCG bagi pemerintahan SBY-Boediono terkait upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

PR pemerintah menjadi instrumen kunci dalam pelaksanaan GCG. Rosady Ruslan, sebagaimana dikutip Sari (2012:83), merangkum fungsi pokok dari PR pemerintah sebagai berikut.

1. Mengamankan kebijakan pemerintah, misalnya menyosialisasikan suatu kebijakan atau aturan baru agar diterima oleh masyarakat.
2. Menyampaikan informasi kepada publik mengenai kebijakan, aktivitas, maupun prestasi suatu instansi, khususnya melalui media massa.
3. Menjadi komunikator (juru bicara), sekaligus mediator yang proaktif menjembatani kepentingan pemerintah dan publiknya.
4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun panjang.
5. Memelihara dan mempertahankan kontak antara organisasi dengan publik, termasuk mengatur *speaking engagement*, pidato, presentasi (*slide*, film, dan sebagainya), serta menyiapkan proposal dan laporan yang diperlukan.

Melihat besarnya tanggung jawab tugas seorang PR di lembaga pemerintah, idealnya PR ditempatkan sejajar dengan manajemen puncak. Atau setidaknya, PR dapat berhubungan langsung dengan manajemen puncak dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, PR dapat menjalankan fungsinya dengan efektif, khususnya sebagai penasihat yang memberikan saran dan masukan berharga bagi organisasi dalam upaya pencapaian tujuannya.

Namun, di lingkungan instansi pemerintahan, PR tidak pernah berada sejajar dengan manajemen puncak (Sari, 2012:76). PR pemerintah umumnya

diposisikan sebagai unsur *staff*, yaitu unit kerja dibawah satuan kerja sekretariat, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Posisi PR di lembaga pemerintah sebagai unsur *staff* menimbulkan beberapa kelemahan. Pertama, PR harus menembus jalur birokrasi yang panjang, yang menghambat efektivitas dan efisiensi kerjanya. Kedua, sebagai *staff*, PR memiliki kewenangan yang terbatas. Bahkan, PR juga mengalami keterbatasan informasi. Seorang PR harus mencari informasi ke berbagai departemen/lembaga terkait, yang terkadang tidak saling terhubung satu sama lain. Keterbatasan wewenang dan informasi dapat mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan pada publik. Ketiga, tanggung jawab kerja PR semakin besar. Seorang PR harus menjadi jembatan antara pemerintah dan publiknya, serta antarsatuan kerja dalam lembaga itu sendiri.

Melihat tantangan pada posisi PR di lembaga pemerintah, Penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai peran PR di lembaga pemerintah. Penulis berkesempatan untuk mempelajarinya melalui kerja magang di TNP2K.

## **1.2. Tujuan Kerja Magang**

Tujuan dari praktik kerja magang adalah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama masa kuliah dalam kondisi dunia kerja yang sesungguhnya. Secara khusus, melalui praktik kerja magang di TNP2K, Penulis dapat mendalami peran PR dalam lembaga pemerintah: bagaimana lembaga pemerintah memandang fungsi PR, apa saja tugas dan tanggung jawab seorang PR di lembaga pemerintah, dan signifikansi peran PR dalam lembaga tersebut.

Selain itu, dengan melaksanakan praktik kerja magang, Penulis dapat mengembangkan wawasan mengenai dunia kerja, meningkatkan profesionalisme sebagai seorang PR. Penulis belajar untuk menjadi individu yang inisiatif, tetapi juga mampu bekerja sama dalam tim. Penulis juga dapat belajar untuk membangun *networking* dengan berbagai pihak. Dengan demikian, kelak akan lebih mudah beradaptasi dengan dunia kerja.

### 1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Praktik kerja magang dilaksanakan di Divisi Komunikasi Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang beralamat di Grand Kebon Sirih lantai 16, Jalan Kebon Sirih Raya No. 35, Jakarta Pusat. Praktik kerja magang dilaksanakan selama tiga bulan, sejak tanggal 5 Februari 2013 sampai 30 April 2013. Waktu kerja magang adalah Senin-Jumat, pukul 09:00-17:00.

Prosedur pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut.

1. Pengarahan  
Pihak kampus memberikan pengarahan mengenai praktik kerja magang kepada mahasiswa.
2. Pencarian tempat magang  
Penulis mencari tempat magang dengan memanfaatkan berbagai sumber: *career centre* UMN, *corporate website*, dan Twitter. Penulis mendapatkan informasi mengenai kesempatan magang di TNP2K dari Twitter (@kampusupdate).
3. Administrasi  
Penulis meminta transkrip nilai dari BAAK, serta mengajukan *form* permohonan kerja magang dan meminta surat pengantar dari jurusan.
4. Permohonan kerja  
Penulis mengirimkan *application letter* beserta CV dan transkrip nilai ke perusahaan tujuan. Permohonan praktik kerja magang di TNP2K dikirimkan melalui *e-mail* kepada Rajeshanagara Sutedja pada tanggal 1 Februari 2013.
5. Proses wawancara dan penerimaan  
Pihak TNP2K menghubungi Penulis untuk melakukan wawancara pada tanggal 4 Februari 2013. Setelah proses wawancara selesai, Penulis dinyatakan diterima untuk melaksanakan magang di TNP2K selama tiga bulan, yang langsung dimulai keesokan harinya tanggal 5 Februari 2013.